

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Agency Teory

Persektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami penerapan standar laporan keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK-EMKM). Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen akuntansi yang bervariasi dalam penerapan kebijakan akuntansi perusahaan guna mendapatkan hasil yang diinginkan. (Ayem dan Prihatin, 2020)

Dewan Standar Akuntansi (DSAK)-IAI dalam naungan pemerintahan menerbitkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah. UMKM sebagai agen melaksanakan atau menerapkan standar akuntansi tersebut untuk kepentingan kemajuan usahanya. Pemerintah sebagai prinsipal dalam perpajakan memerintahkan pengusaha untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah pengusaha sebagai agen lebih mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk dengan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak.

Teori Agensi diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang memberikan suatu gambaran bahwa perusahaan diibaratkan sebagai suatu kumpulan kontrak yang menunjukkan hubungan keagenan antara principal (pemilik) kepada agen (manajer). Hubungan ini juga memberikan gambaran bahwa ketika setiap pihak memiliki keinginan untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing akan terdapat peluang bahwa manajer melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya yang tidak sesuai dengan kepentingan dari pemilik (pemegang saham). Indikasi yang muncul ialah manajer tidak melaksanakan kewajibannya bagi kepentingan pemegang saham melainkan untuk kepentingannya sendiri. Hal ini

kemudian yang dikenal sebagai permasalahan dalam keagenan (*agency problem*).

Teori agensi dapat menjadi landasan atau dorongan dari pelaku usaha sebagai penyedia laporan keuangan untuk secara mandatory menyajikan laporan keuangan dan menggunakan SAK EMKM. Dengan kondisi tertentu yang dibangun, penerapan SAK EMKM akan dapat semakin dipahami dan diterapkan oleh pelaku UMKM. Dasar dari teori ini dapat menjadi pondasi guna mendorong peningkatan penggunaan standar EMKM. (Kareja et al, 2022)

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu bagian dari proses pelaporan keuangan. Kondisi keuangan sebuah perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan tersebut, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan keuangan lainnya (Riswan, dan Kesuma, 2014). Menurut Bambang Riyanto (2012:327), Laporan Finansial (*Financial Statement*), yaitu memberikan ikhtisar atas keadaan suatu perusahaan, dimana Neraca yang mencerminkan nilai aktiva, utang, dan modal sendiri, dan laporan rugi dan laba mencerminkan atas hasil yang telah dicapai selama periode tertentu. (Rabuisa et al, 2018)

2.2.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu :

1. Neraca Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah asset (harta), kewajiban (hutang) dan modal (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu.
2. Laporan laba rugi Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi tergambar jumlah pendapatan dan sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan

jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dengan kata lain suatu laporan laba rugi, mengukur jumlah laba yang yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

3. Laporan perubahan modal Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal.
4. Laporan arus kas Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan ini terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar.
5. Laporan catatan atas laporan keuangan Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. (Novriansyah et al, 2020)

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Secara rinci Kasmir (2018:11), mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan Informasi keuangan lainnya. (Syaharman, 2021)

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

2.3.1 Pengertian SAK (EMKM)

Akuntansi Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) adalah standar akuntansi yang dibuat khusus untuk usaha-usaha berskala mikro, kecil dan menengah dalam pembuatan Laporan Keuangan mereka. SAK EMKM efektif diterapkan di Indonesia per 1 Januari 2018. (Kalsum et al, 2020). Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016:1) Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM) merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan UU 20 tahun 2018 yang berlaku di Indonesia. Penerapan SAK EMKM selama dua tahun berturut-turut dalam laporan keuangan entitas disusun dengan menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha. sebagaimana juga digunakan entitas selain entitas mikro kecil dan menengah serta menggunakan konsep entitas bisnis. Semua pihak sangat akan mengerti pentingnya laporan keuangan dalam usaha. (Rachmanti et al, 2019)

2.3.2 Bagian-Bagian Pada SAK (EMKM)

Laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam SAK EMKM, laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas.

Sedangkan untuk laporan laba ruginya terdiri dari pendapatan, beban usaha, beban pajak penghasilan, dan laba rugi kotor dan laba rugi bersih setelah pajak.

Tabel 2.1
Kerangka Konsep Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Aset			
Aset Lancar	Catatan	20X8	20X9
• Kas dan Setara Kas		xxx	Xxx
• Kas		xxx	Xxx
• Giro		xxx	Xxx
• Depositi		xxx	Xxx
Jumlah Kas dan Setara Kas		xxx	Xxx
Aset Tetap			
• Akumulasi Penyusutan Tetap		xxx	Xxx
Jumlah Aset		xxx	Xxx
Liabilitas			
• Hutang Usaha			
• Hutang Bank			
• Jumlah Liabilitas			
Ekuitas			
• Modal		xxx	Xxx
• Saldo Laba		xxx	xxx
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		xxx	Xxx

Tabel 2.1 menjelaskan bahwa, laporan posisi keuangan terdiri dari akun-akun yang disebutkan diatas sesuai SAK EMKM. Dalam SAK EMKM (2016:3), aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas

yang mengandung manfaat ekonomik. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. (Fitriyyah et al, 2020)

Tabel 2.2
Kerangka Konsep Laporan Laba Rugi
Berdasarkan SAK EMKM

Entitas
Laporan Laba Rugi
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X8

Pendapatan	catatan	20X8	20X9
• Pendapatan Usaha		xxx	Xxx
• Pendapatan Lain-Lain		xxx	Xxx
Jumlah Pendapatan Beban		xxx	Xxx
• Beban Usaha		xxx	Xxx
• Beban Lain-Lain		xxx	Xxx
Jumlah Beban		xxx	Xxx
Laba Rugi Sebelum Pajak Penghasilan		xxx	Xxx
• Beban Pajak Penghasilan		xxx	Xxx
Laba Rugi setelah pajak penghasilan		xxx	Xxx

Tabel 2.2 menjelaskan bahwa, dalam laporan laba rugi terdiri dari akun pendapatan dan beban. Dalam SAK EMKM (2016:4), pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, misalnya: penjualan, imbalan, bunga, deviden, royalti, dan sewa. Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal meliputi, misalnya, beban pokok, penjualan, upah, dan penyusutan. Namun, untuk perusahaan manufaktur menggunakan laporan harga pokok produksi yang digunakan.

2.4 Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan merupakan suatu kondisi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang yang didapatkan melalui pendidikan formal dan telah disahkan oleh Departemen Pendidikan sebagai usaha guna mengembangkan potensi didalam dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Lohanda, 2017).

Tingkat atau jenjang pendidikan yaitu tahapan didalam pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan dari peserta didik, kemampuan yang dikembangkan, dan tujuan yang akan dicapai. Tingkat atau jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non formal yang saling melengkapi. Pendidikan tersebut dilakukan dengan sistem terbuka melalui tatap muka maupun jarak jauh. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab VI pasal 14 menyebutkan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. (Julyanda dan Rejeki, 2018).

Tingkat pendidikan merupakan tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh oleh pemilik UMKM. Tingkat pendidikan meliputi SD, SMP sederajat, SMA sederajat, diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi penting bagi kesiapan untuk menghadapi tantangan global. (Nurdwijayanti dan Sulastiningsih, 2018)

2.5 Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan merupakan bidang pendidikan yang telah diambil oleh pengusaha meliputi bidang akuntansi, manajemen, ekonomi, atau lainnya. (Diana, 2018)

Latar belakang pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam

Pasal 3 menjelaskan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pengertian latar belakang pendidikan disini adalah latar belakang pendidikan formal. (Jullyanda dan Rejeki, 2018)

Latar belakang pendidikan pelaku UMKM bisa mempengaruhi persepsi pelaku UMKM tersebut mengenai betapa pentingnya melakukan pembukuan dan juga pelaporan keuangan usahanya untuk pertumbuhan dan perkembangan usahanya. Pengetahuan tentang akuntansi, khususnya mengenai fungsi laporan keuangan diperoleh jika seseorang menjalani pendidikan akuntansi. Pelaku usaha yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi diyakini dapat memiliki persepsi yang lebih baik tentang SAK EMKM dibandingkan dengan pelaku usaha yang memiliki latar belakang selain akuntansi.

2.6 Persepsi Pemilik

Menurut Telford (2008), persepsi adalah aktivitas mempersepsikan orang lain dan apa yang membuat seseorang dikenali. Melalui persepsi, individu berusaha mencari tahu tentang orang lain. Persepsi juga dapat diartikan pembelajaran terhadap bagaimana individu membentuk kesan dan membuat kesimpulan tentang orang lain.

Persepsi dapat diartikan sebagai penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Penjelasan dari arti tersebut yaitu sebuah pandangan atau pengertian seseorang dalam mengartikan sesuatu. Secara formal, persepsi merupakan suatu proses seseorang melakukan seleksi, mengorganisasikan, dan interpretasikan suatu hal ke dalam suatu gambaran yang lebih luas (dunia) yang memiliki arti dan menyeluruh.

Menurut Siameto (2010:102) Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium.

Dengan demikian persepsi merupakan proses perlakuan individu (dalam hal ini, pengusaha UMKM) yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu

2.7 Ukuran Usaha

Ukuran usaha adalah salah satu cara untuk mengetahui besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari jumlah karyawan yang digunakan perusahaan, jumlah aset yang dimiliki perusahaan, jumlah penjualan yang dicapai perusahaan dalam suatu periode. (Suryati, 2021)

Ukuran usaha merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa jumlah pendapatan yang didapatkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. (Holmes dan Nicholls, 2019). Jumlah penjualan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan dapat menunjukkan perputaran modal atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga semakin besar pendapatan yang diperoleh maka akan semakin besar pula tingkat kompleksitas perusahaan dalam menggunakan informasi akuntansi. (Julyanda dan Rejeki, 2018)

Haryani (2018) yang mendefinisikan ukuran usaha sebagai suatu skala yang menentukan besar kecilnya usaha yang dapat dilihat dari jumlah karyawan, aset usaha, dan penjualan usaha yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan atau pelayanan atau produk suatu organisasi.

2.8 Pemberian Informasi dan Sosialisasi

Soekanto (2016) mengemukakan bahwa sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Informasi akuntansi melalui pelaporan keuangan sebagai hasil dari sistem informasi keuangan memiliki tujuan yang beberapa diantaranya adalah :

- a. Menyediakan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor
- b. Menyediakan informasi posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi (kekayaan) perusahaan serta asal dari kekayaan tersebut.
- c. Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya.
- c. Menyediakan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam memperkirakan arus kas masuk ke dalam perusahaan. (Efriyenti dan Yusran, 2019).

Sosialisasi SAK EMKM merupakan sosialisasi yang didapatkan oleh pemilik UMKM mengenai SAK EMKM yang diperoleh dari pihak-pihak terkait yang dapat memberikan sosialisasi seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), atau lembaga lainnya. Pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh pelaku UMKM dari sosialisasi SAK EMKM akan memberikan dorongan atau motivasi untuk mengimplementasikan SAK EMKM. (Parhusip dan Herawati)

2.9 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.9.1 Pengertian Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut M. Kwartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang

punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tana dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia. Bidang-bidang UMKM beragam mulai dari fashion, kuliner, kerajinan hingga pertanian. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.”

Sesuai dengan namanya, UMKM dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Masing-masing jenis memiliki definisi dan contohnya masing-masing. Sementara jika digolongkan secara statistik, UMKM bisa dibedakan menurut sektor ekonominya, yaitu:

1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.
2. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
3. Perdagangan, hotel dan restoran.
4. Pertambangan dan penggalian.
5. Listrik, gas, dan air bersih.
6. Angkutan dan komunikasi.
7. Industri pengolahan.
8. Bangunan.
9. Jasa.

Menurut penjelasan yang ada dalam Undang-undang ketentuan dari pemerintah, UMKM terdiri dari 3 jenis :

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam

Undang- Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebuah bisnis bisa disebut sebagai usaha mikro bila angka penjualan atau omzet dalam setahun mencapai maksimal Rp300 juta dan jumlah aset bisnisnya maksimal Rp50 juta, di luar perhitungan tanah dan bangunan. Dalam pengelolaan keuangan bisnis usaha mikro, ada sebagian pemilik usaha yang masih mencampurkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Berdasarkan perkembangannya, usaha mikro bisa diklasifikasi menjadi dua, yaitu: Livelihood, yaitu usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor informal. Contohnya, pedagang kaki lima. Micro, merupakan usaha mikro yang sudah cukup berkembang, namun masih memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor.

2. Usaha Kecil

Pengertian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis pada Pasal 6 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2008. Sebuah bisnis bisa dikategorikan sebagai sebuah usaha kecil bila memiliki kekayaan bersih antara Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta, dan penjualan per tahun berada di antara Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar. Berbeda dengan usaha mikro, pengelolaan keuangan usaha kecil sudah lebih profesional. Tidak ada lagi yang namanya mencampurkan perhitungan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi.

3. Usaha Menengah

Jenis yang terakhir dari UMKM adalah usaha menengah. Usaha ini adalah bidang ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Kekayaan bersih usaha menengah di luar tanah dan bangunan sudah bisa mencapai di atas angka Rp500 juta per tahun. Usaha menengah juga memiliki kriteria omzet penjualan sebesar lebih dari Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar per tahun. Pengelolaan keuangan dalam usaha menengah sudah benar-benar terpisah. Selain itu, biasanya usaha ini juga sudah mendapatkan legalitas atau sah di mata hukum sebagai sebuah bisnis.

2.9.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00

2.10 Penelitian Terdahulu

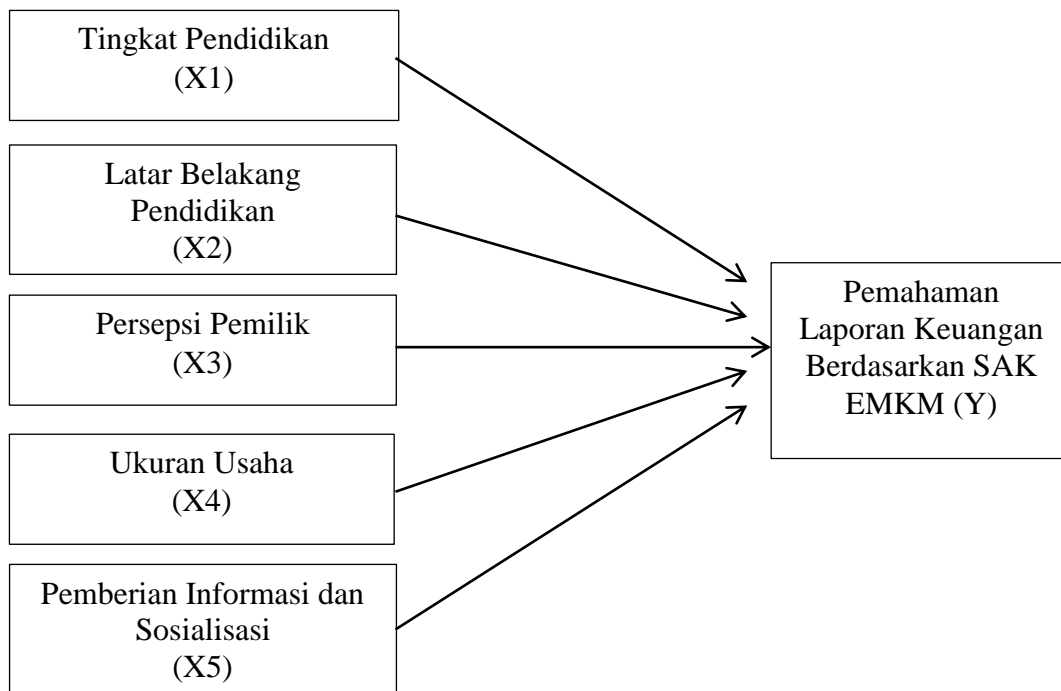
Tabel 2.3

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Vionna Dian Arnetta dan Wiwik Hidajah Ekowati (2022)	Analisis Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Pemahaman Umkm Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Emkm (Studi Kasus Umkm Di Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan)	X1 : Tingkat Pendidikan X2 : Latar Belakang Pendidikan X3 : Ukuran X4 : Pengetahuan Akuntansi X5: Pemberian Informasi dan Sosialisasi Y : Pemahaman UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM	Hasil Penelitian Ini Yaitu ukuran usaha dan pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, sedangkan Tingkat Pendidikan, Latar Belakang Pendidikan Dan Pemberian Informasi dan Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM
2.	Mardiana, Maulan Irwadi, Dan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	X1 : Pemberian Informasi Dan Sosialisasi	Hasil Penelitian Ini Yaitu Variabel

	Iin Sriyani (2021)	UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Di Kecamatan Sanga Desa	X2 : Latar Belakang Pendidikan Pelaku UMKM X3 : Jenjang Pendidikan Pemilik UMKM X4 : Lama Usaha X5 : Skala/Ukuran Usaha Y : Pengaruh UMKM Terhadap SAK EMKM	Pemberian Informasi Dan Sosialisasi, Latar Belakang Pendidikan Pelaku UMKM, Jenjang Pendidikan Pelaku UMKM, Lama Usaha, Dan Skala/Ukuran Usaha Berpengaruh Positif Terhadap Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan
3.	Delvin Kautsar, Dan Dewi Rejeki (2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Umkm Dalam Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM Di Kelurahan Jakasetia	X1 : Pemberian Informasi Dan Sosialisasi X2 : Latar Belakang Pendidikan X3 : Jenjang Pendidikan X4 : Lama Usaha X5 : Ukuran Usaha Y : Pemahaman Sak Emkm	Hasil Penelitian Ini Yaitu Semua Variabel Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM
4.	Tutik Siswanti dan Indah Suryati (2020)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Study Kasus pada UMKM	X1 : Ukuran Usaha X2 : kompetensi SDM Y : penerapan SAK EMKM	Hasil Penelitian Ini Yaitu variabel ukuran usaha dan kompetensi SDM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK EMKM

		Kecamatan Makasar, Jakarta Timur)		
--	--	---	--	--

2.11 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

2.12 Bangunan Hipotesis

1. Tingkat Pendidikan

Pelaku usaha yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, akan memiliki tingkat pemahaman mengenai SAK EMKM yang lebih tinggi pula. Hal ini dikarenakan pelaku usaha tersebut akan lebih mudah memahami mengenai betapa pentingnya melakukan pembukuan dan juga melakukan pelaporan keuangan mengenai usaha yang sedang dijelankannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin memudahkan seseorang untuk menyerap informasi mengenai SAK EMKM dan menerapkannya.

Uraian tersebut sejalan dengan pendapat Adino (2019) yang membuktikan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh pelaku UMKM, maka akan semakin

tinggi pula pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

H1 : Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

2. Latar Belakang Pendidikan

Pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi akan memiliki tingkat pemahaman mengenai SAK EMKM yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pada saat menempuh pendidikan, pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan mengenai akuntansi khususnya pengetahuan mengenai laporan keuangan dan manfaat yang didapatkan apabila menerapkan pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dalam usaha yang dirintisnya. Pelaku UMKM yang mempunyai latar belakang ekonomi akan lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM karena pelaku UMKM telah mampu untuk membuat laporan keuangan yang kemudian disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu SAK EMKM.

Uraian tersebut sejalan dengan pendapat (Kautsar dan Rejeki ,2020) yang membuktikan bahwa variabel Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Karena pengelola UMKM yang berlatar belakang akuntansi cenderung lebih cepat memahami proses penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dibandingkan pengelola laporan keuangan dari usaha para UMKM. Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan maka bisa ditarik hipotesis yaitu:
H2 : Latar Belakang Pendidikan berpengaruh terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

3. Persepsi Pemilik

Menurut Siameto (2010:102) Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium.

Uraian tersebut sejalan dengan pendapat (Febriyanti dan Wardhani, 2018) yang membuktikan bahwa variabel persepsi pemilik berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelaku UMKM mempunyai persepsi bahwa SAK UMKM cukup penting sebagai alat akuntabilitas usaha maka pelaku UMKM akan menyusun SAK EMKM

Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan maka bisa ditarik hipotesis yaitu:
H3 : Persepsi pemilik berpengaruh terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

4. Ukuran Usaha

Semakin besar ukuran usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM maka akan mempengaruhi pemahaman dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran usaha akan semakin besar pula kebutuhan modal usaha yang diperlukan pelaku UMKM tersebut untuk menjalankan usahanya. Apabila pelaku UMKM tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan modalnya itu, maka diperlukan suntikan dana dari pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut akan meminta bukti kelayakan usaha yang tengah dijalani dengan meminta laporan keuangan kepada pihak UMKM. Desakan kebutuhan modal inilah memahami mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM.

Uraian tersebut sejalan dengan pendapat Siswanti & Suryati (2020) yang menyatakan bahwa variabel Ukuran usaha berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. UMKM yang sudah tumbuh dan berkembang dari segi harta maupun penghasilan akan membutuhkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang lebih baik dan lebih tertata lagi agar mengetahui pertumbuhan asetnya, pertumbuhan labanya dari waktu-waktu karena setiap usaha memiliki target untuk lebih berkembang.

Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan maka bisa ditarik hipotesis yaitu:
H4 : Ukuran Usaha berpengaruh terhadap Pemahaman Laporan Keuangan

Berdasarkan SAK EMKM

5. Pemberian Informasi dan Sosialisasi

Pemberian informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh IAI, lembaga terkait maupun pihak lain yang terkait kepada pelaku UMKM akan mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Hal ini dikarenakan informasi dan juga sosialisasi akan memberikan pengetahuan mengenai laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, sehingga akan mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM tersebut. Semakin sering pelaku UMKM mendapatkan informasi dan sosialisasi maka pelaku UMKM tersebut akan lebih memahami bagaimana menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dan juga memahami seberapa pentingnya melakukan pembukuan dan juga melakukan pelaporan keuangan untuk usahanya.

Uraian tersebut sejalan dengan pendapat Haryani (2018) yang membuktikan bahwa variabel pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap pemahaman mengenai SAK EMKM. Artinya pemberian informasi dan sosialisasi merupakan faktor yang menentukan tingkat pemahaman atas SAK EMKM.

Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan maka bisa ditarik hipotesis yaitu:
H5 : pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM